

EFEKTIVITAS EMBARGO DALAM MENDORONG DEMOKRATISASI DI MYANMAR

Sugiarto Pramono

Dosen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Wahid Hasyim

Jl. Menoreh Tengah / 22 Sampangan Semarang,

tlp: (024) 8505680-850568, fax: (024) 8505680

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Mei 2014

Disetujui Juni 2014

Dipublikasikan Juni 2014

Keywords :

Words: Embargo, effectiveness

Abstrak

Tekanan internasional terhadap junta di Myanmar (khususnya embargo Amerika, PBB dan Eropa) menjadi sinyal positif bagi gerakan demokrasi di negara ini, meskipun efektif atau tidaknya masih dipertanyakan. Belum lagi masalah selesai, pesimisme perkembangan demokrasi di Myanmar diperkuat oleh mendekatnya dua raksasa baru dalam perekonomian dunia (India dan China); dan "si anak nakal", Korea Utara.

Sebagai dua negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kebutuhan energi tidak bisa ditunda. Kebutuhan energi dari dua raksasa bertemu dengan kepentingan Myanmar yang di satu sisi memiliki sumber daya energi yang melimpah seperti gas alam dan minyak bumi, namun di sisi lain memerlukan dukungan politik dari India dan China karena tekanan internasional.

Sementara itu, argumen realis "musuhnya musuh adalah teman" telah mendorong Korea Utara untuk memasok teknologi nuklir ke Myanmar. Selain faktor-faktor internasional tersebut, studi ini juga menemukan sejumlah pola yang terkait dengan keterlibatan China, India dan Korea Utara dalam kegagalan embargo: (1) distribusi kekuatan ekonomi politik global telah menjadi lebih kompleks. Amerika Serikat, Uni Eropa dan PBB tidak lagi menjadi aktor global yang tanpa tanding, munculnya raksasa Asia tampaknya melemahkan jika enggan untuk mengatakan: mengakhiri dominasi mereka; (2) pergeseran kekuatan ekonomi politik dari yang sebelumnya di barat (Amerika dan Eropa) pindah ke timur (India dan Cina); dan (3) pergeseran kekuatan global tersebut tampaknya akan membuka kemungkinan perubahan perilaku negara-negara dunia ketiga yang terlihat salah satunya adalah dari perilaku Myanmar.

Abstract

International pressure on the junta in Myanmar (in particular the American, UN and Europe embargo) becomes positive signal to the democracy movement in the country, although effective or not is still questionable. Not to mention the matter is completed, the pessimism of development of democracy in Myanmar is reinforced by the approach of two new giant in the world economy (India and China); and "naughty child", North Korea.

As two country with high economic growth, energy needs can not be

postponed. energy Interests of the two giant meets the Myanmar interests that one side has abundant energy resources such as natural gas and petroleum, but on the other hand require political support from India and China because of international pressure. And, the argument of realist "enemies enemy is a friend" has encourage North Korea to supply nuclear technology to Myanmar.

In addition to these international factors, this study also found a number of patterns associated with the involvement of China, India and North Korea in the failure of the embargo: (1) distribution of the power of the global political economy has become more complex. USA, EU and the UN are not longer a global actors uncontested, the rise of the Asian giants seem to weaken if reluctant to say: terminate their domination; (2) the pattern of change in the political-economic power shift from the previous one in the west (America and Europe) moved to the east (India and China); and (3) changes in the pattern would seem to open the possibility of changing of the behavior of third world countries who are seen, one of which is Myanmar's behavior.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
sugiartop@gmail.com

PENDAHULUAN

Tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa proses demokrasi di suatu negara tidak dapat dilepaskan dari konteks internasional. Kendati harus diakui betapa aneka faktor domestik memainkan peran penting dalam dinamika demokrasi dalam suatu negara, namun bukan berarti seting internasional tidak berpengaruh. Pola interdependensi dalam ekonomi politik global kontemporer membuka kemungkinan yang sangat lebar bagi proses demokrasi di suatu negara memiliki kaitan yang erat dengan konteks eksternal.

Pandangan skeptis masyarakat dunia terhadap perkembangan demokrasi di Myanmar nampak dari aneka respon yang ditujukan terhadap hasil pemilu 7 November 2010. Presiden ASEAN *Inter-Parliamentary Myanmar Caucus* (AIPMC) Eva Kusuma Sundari mengatakan: "Hasil pemilu Myanmar harus ditolak. Alasannya, pemilu yang digelar Junta itu tidak memiliki unsur

sebagai pemilu yang bebas dan bersih" (tempinteraktif.com: Indonesia Diminta Tolak Hasil Pemilu Myanmar). Bahkan Komite Hak Asasi Manusia PBB juga mengutuk pemilu yang baru digelar tersebut dengan mengatakan bahwa hasil pemilu tersebut adalah kecurangan (international.okezone.com: PBB Kutuk Hasil Pemilu Myanmar). Apa yang dikhawatirkan khalayak internasional perihal pemilu di Myanmar akhirnya terjadi. Hasil pemilu menunjukkan lebih dari 80 persen suara diraih oleh partai yang didukung oleh Junta, yakni *Union Solidarity and Development Party* (USDP) dan *National Unity Party* (NUP), alhasil Junta tetap memegang kendali kekuasaan di Myanmar.

Secara spesifik tulisan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi pengaruh konteks internasional terhadap dinamika demokratisasi di Myanmar. Penulis tentu tidak menafikan seting domestik dalam turut membentuk dan mempengaruhi dinamika demokrasi Myanmar, namun hal itu tidak

membuat faktor eksternal kehilangan makna. Dimensi ekonomi-politik baik di tingkat domestik maupun intermestik telah berjaln berkelindan sembari mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika demokrasi di tingkat domestik Myanmar.

Kemenangan Junta dalam pemilu menyuguhkan kepada kita: ketidakefektifan embargo Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Myanmar untuk menciptakan demokrasi di negeri para Jenderal itu. Kegagalan tiga kekuatan global merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Secara lebih spesifik tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: *mengapa embargo AS, UE dan PBB terhadap Myanmar tidak efektif?*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan berbagai data sekunder yang berasal dari media massa baik cetak maupun *on line*, berbagai jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku serta berbagai sumber lain yang dianggap relevan. Salah satu ciri khas metode kualitatif adalah mengeksplorasi secara mendalam apa yang menjadi sasaran penelitian.

Kerangka konseptual

Untuk menganalisa sejauh mana pengaruh embargo ekonomi AS, UE dan PBB terhadap dinamika demokrasi di Myanmar, penulis menggunakan sedikitnya dua kerangka pikiran. *Pertama*, pikiran Ricard Falk, O'Donnell, Schmitter dan Wesolowski yang meyakini konteks internasional memiliki pengaruh terhadap dinamika

demokratisasi di tingkat domestik dan *kedua* konsepsi mengenai embargo sebagai instrumen kebijakan global.

Demokrasi dan seting global

Kendati faktor domestik memainkan peran kunci dalam dinamika demokrasi suatu negara, namun sulit bagi kita menutup mata terhadap pengaruh seting global khususnya dimensi ekonomi-politik terhadap proses demokrasi di suatu negara. Ricard Falk merupakan salah satu ilmuwan yang meyakini adanya pengaruh seting eksternal itu. Falk menawarkan dua pendekatan untuk kaitan-kaitan tersebut, yaitu: pendekatan sistemik dan pendekatan aktor (Mas'ood, M., 2003, 24).

Dalam pendekatan sistemik, Falk menunjukkan terdapat korelasi antara struktur ekonomi-politik baik di tingkat global maupun regional terhadap proses demokrasi suatu negara. Interdependensi ekonomi semakin memperkecil kemungkinan suatu negara dapat menentukan arah kebijakannya secara independen. Dinamika demokrasi di Myanmar menjadi contoh baik dalam hal ini betapa stuktur sistem global telah mempengaruhinya. Interdependensi atau saling ketergantungan antar berbagai aktor semakin memperkecil kemampuan suatu negara untuk bertindak secara independen. Setiap kebijakan yang dibuat selalu akan mempengaruhi dan dipengaruhi (f)aktor lain.

Pendekatan *kedua* menekankan pada peran aktor global ketimbang struktur. Baik aktor negara (*state*) maupun non negara (*non-state*) seperti individu-individu penting, perusahaan-perusahaan multinasional (*multi national cooperations*) sebut saja saja *Free*

Port dan *Exxon Mobil* hingga berbagai kelompok kepentingan yang bergerak dalam sektor lingkungan, hak asasi manusia dan demokrasi memainkan peran penting dalam turut mempengaruhi dinamika demokrasi di tingkat domestik.

Contoh paling mudah ditunjuk adalah ketika pada tahun 1978 kebijakan AS terhadap Iran dianggap sejalan dengan kebijakan Shah Reza Pahlevi pemimpin anti demokrasi. Faktor ekonomi politik membuat hubungan Adi Daya dengan rezim penguasa kala itu berlangsung harmonis. Implikasi paling dekat dari kemesraan hubungan tersebut adalah dirampasnya kebebasan politik warga Iran oleh kediktatoran Pahlevi atas restu AS.

Permisalan lain, invasi AS ke Irak tahun 2003 dengan alasan menumbangkan rezim otoriter di bawah pimpinan Sadam justru digantikan oleh “rezim boneka” yang kendati didisain dengan format demokrasi namun justru menciptakan konflik etnis berkepanjangan, dan kepentingan ekonomi-politik AS disinyalir bermain.

Ilmuan lain yang memberikan perhatian pada faktor eksternal adalah O'Donnell, Schmitter dan Wesolowski. Wesolowski, menulis:

Benarkah begitu? Seorang ilmuan Polandia yang menulis tentang proses demokratisasi di Eropa Timur berpendapat sebaliknya. Dalam tulisan itu Ia menyatakan bahwa dunia masa kini terbagi dalam 'pusat' dan 'pingiran'. Proses yang berlangsung di Polandia dewasa ini tidak bisa dianalisis secara terpisah dari proses-proses di Uni Soviet.....sudah sampai saatnya ketika Uni Soviet menjadi pendukung gagasan pluralisme politik.....jika kita bisa

menerima proposisi bahwa perubahan pusat itu mempengaruhi pinggiran, harapan akan mundurnya otoriterisme di Blok Timur akan diperkuat.....revolusi anti Komunis di Cekoslovakia dan Jerman Timur menciptakan suatu konteks internasional yang menguntungkan bagi perubahan lebih lanjut di Polandia. Begitu pula perkembangan politik di Uni Soviet (dikutip oleh Mas'oed, M., 2003, 203).

Selanjutnya, pengaruh seting global terhadap dinamika demokrasi di Myanmar sedikitnya mewujud dalam dua bentuk: (1) embargo yang dilakukan PBB, AS dan UE terhadap Junta; dan (2) konstalasi kepentingan India-Cina dan Korut, sehingga untuk membantu memahami bagaimana pola hubungan tersebut maka berikut akan dipaparkan konsep embargo.

Embargo

Dalam konteks ekonomi-politik global yang semakin kait terkait, ekonomi menjadi salah satu instrumen global yang dipandang memiliki relevansi terutama di era paska perang dingin. Instrumen militer yang acapkali berimplikasi destruktif bahkan hingga tingkat yang tidak dapat dikendalikan dianggap tidak rasional bila digunakan. Instrumen ekonomi diyakini jauh lebih beradab ketimbang instrumen perang. Semakin tereduksinya derajat relevansi militer dalam sistem global yang berpola *complex interdependence* berbanding terbalik dengan semakin menguatnya kegunaan ekonomi sebagai instrumen dalam hubungan global.

Secara lebih operasional ekonomi sebagai instrumen dapat berupa *rewards*

seperti *capital grand*, *soft loan*, *investment guarantes* dan *punishment* seperti *Freezing Bank Assets*, *Import Boycotts*, *Increasing Tarrif*, *Embargoes* dan sebagainya (Purwono, A., 2008). Dalam perniagaan dan politik internasional, embargo adalah pelarangan perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara. Embargo umumnya dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasi-nya dan menyebabkan negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit (Purwono, A.: 2008). Embargo biasanya digunakan sebagai hukuman politik bagi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan. Salah satu contoh embargo adalah yang pernah dilakukan Amerika terhadap Irak sebelum pada akhirnya negara tersebut diinvasi pada tahun 2003.

Embargo ditujukan untuk mengendalikan dan mempengaruhi tingkah laku dan pikiran negara lain. Salah satu yang perlu digaris bawahi adalah bahwa embargo nyaris tidak dapat digunakan oleh negara yang tidak memiliki basis ekonomi yang kuat, sehingga sejumlah syarat harus dimiliki, yaitu: (1) *financial power*; (2) *political will* (kemauan untuk menggunakan kekuatan ekonomi); (3) *skill in applications* yakni ketrampilan dalam menggunakannya; serta (4) reputasi dalam menggunakannya (Purwono, A., 2008).

Efektifitas embargo

Seberapa efektifkah embargo? Terhadap pertanyaan ini, maka ada sedikitnya tujuh indikator yang dapat dijadikan tolak ukur: (1) *the stake was hight* (resiko tinggi); (2) sanksi akan gagal ketika ada pihak lain yang mensuplai; (3) sanksi akan memicu munculnya patriotik dari

negara sasaran; (4) sanksi butuh waktu untuk dimobilisasi; (5) sanksi berpotensi memproduksi problem administratif dan hukum dengan kompleksitas tinggi sehingga membutuhkan energi ekstra dari birokrasi; (6) sanksi berarti reduksi atau akhir dari bantuan luar negeri sehingga sanksi akan sulit diterapkan jika ada kesamaan kepentingan sebelumnya antara negara donor dan target; dan (7) berbeda dengan serangan militer, sanksi memiliki dampak merusak yang tidak diskriminatif artinya mengenai semua. Pada akhirnya sanksi ekonomi akan efektif jika dibarengi dengan *force*, propaganda dan diplomasi terutama jika targetnya negara lemah (Purwono, A., 2008).

Selanjutnya terdapat banyak cara untuk mengukur tingkat efektifitas suatu embargo, salah satunya dan yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan membandingkan antara motif embargo dengan hasil yang dicapai. Bila tujuan embargo adalah untuk mengendalikan prilaku suatu negara, maka semakin patuh suatu negara terhadap tuntutan embargo, semakin efektif embargo tersebut namun sebaliknya semakin jauh prilaku suatu negara dari prilaku yang diharapkan semakin tidak efektif suatu embargo.

Dalam kasus embargo terhadap Junta di Myanmar, bisa disarikan secara implisit bahwa tujuan embargo yang dilakukan tiga kekuatan kunci dunia itu adalah untuk memperlemah basis ekonomi penguasa Myanmar, sehingga berimplikasi pada delegitimasi penguasa. Dengan menggunakan tolak ukur efektifitas berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka embargo yang dilakukan AS, UE dan PBB terhadap Myanmar sangat jauh panggang dari api.

Alih-alih berimplikasi pada delegitimasi kekuasaan Junta, pemerintah berkuasa justru semakin terlegitimasi oleh hasil pemilu November 2010 lalu, bahkan ketidak-efektifan embargo semakin tegas dengan pengembangan proyek nuklir oleh Junta.

Bagaimana negara bertahan dari sanksi? Rekaman atas perilaku negara ketika mereka dikenai sanksi ekonomi adalah: (1) *stockpilling*/ menimbun; (2) *diversification of trade (market and sources of supply)*; (3) *domestic substitution*; (4) *exchange control*; (5) *rationing*; (6) *concealment* (seperti pada jumlah minyak yang dijual, atau statistik perdagangan internasional); (7) *transport diversification*; (8) *sanctions busting (clandestine trading)*; dan *counter sanction (commercial/ financial retaliation)* (Purwono, A., 2008). Dengan salah satu atau kombinasi dari serangkaian strategi itu suatu negara bertahan dari embargo.

PEMBAHASAN

Demokratisasi di Myanmar

Pemerintahan yang dibangun Burma paska kemerdekaan 1948 adalah pemerintahan demokrasi. Di bawah pemerintahan sipil U Nu, aneka kebijakan ditujukan untuk merespon berbagai tantangan paska kemerdekaan. Masalah-masalah seperti ketidakstabilan politik dan ekonomi hingga pemberontakan mendominasi isu nasional saat itu. Implementasi serangkaian kebijakan pembangunan yang berbasis pada prinsip *Pydawtha* (negara yang makmur) pada akhirnya gagal menjawab berbagai tantangan sosial politik dan ekonomi pada waktu itu.

Klimaks perjalanan sejarah Burma

muncul menjelang pemilu 1960. Jendral Ne Win diberi tugas untuk menjaga stabilitas politik domestik dan menyelenggarakan pemilu. U Nu pun memenangkan pemilu dan kembali ke tampuk kekuasaan namun demikian hiruk pikuk politik yang akut yang ditandai dengan munculnya para pemberontak dan konflik yang merebak luas membuat pemerintah di bawah U Nu mengalami kesulitan yang sangat berat. Situasi tersebut membawa efek berantai pada sulitnya geliat ekonomi. Buruknya situasi sosial, politik dan ekonomi nasional memposisikan U Nu menjadi tumpuan masyarakat Burma. Bangsa Burma menaruh harapan yang besar pada pemerintahan baru tersebut yang waktu itu sudah terlihat sangat kerepotan.

Desakan kuat dari warga negara untuk menciptakan stabilitas politik direspon oleh pihak militer yang pada akhirnya memberi waktu dua tahun kepada pemerintah untuk memulihkan kestabilan ekonomi politik domestik. Akhirnya terbukti pemerintahan U Nu gagal dan militer dengan dukungan warga negara pro militer mengambil alih kekuasaan. Kudeta terjadi pada tanggal 2 Maret 1962.

Tumbangnya rezim U Nu, merupakan awal pemerintah militer di Myanmar. Pemerintah paska U Nu hanya mengakui satu partai yaitu *Burmese Socialist Program Party* (BSPP) yang dibentuknya sendiri. BSPP merupakan partai yang dirancang untuk mendorong program sosialis pemerintah yang didominasi militer. Partai tersebut didirikan tahun 1962 dan disahkan 2 tahun kemudian. Pada tahun 1972 militer menjadi pilar pokok partai.

Intervensi politik militer terulang pada

pemilu 1990 ketika hasil pemilu 27 Mei 1990 yang dimenangkan oleh *National League for Democracy* (NLD) di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi dianulir oleh Jenderal Saw Maung. Lebih jauh Aung San Suu Kyi yang dianggap sebagai “duri dalam daging” bagi Junta pun dijadikan tahanan rumah.

Pemilu yang sarat dengan politik kekuasaan Junta kembali digelar 7 November 2010 lalu dan banyak pihak yang meyakini pesta rakyat itu hanya menjadi basis legitimasi kekuasaan politik rezim militer. Sandera terhadap demokrasi di Myanmar membuat aktor-aktor global seperti PBB, AS dan negara-negara UE geram.

Efektivitas Embargo

Kali pertama embargo terhadap Myanmar diberlakukan oleh UE pada tahun 1990 an, kemudian dikonfirmasi pada 29 Juli 1991 oleh *the General Affairs Council* dan *Common Position* 1996/635/CFSP. Embargo mencakup *weapons and ammunition, weapon and non-weapon platforms and ancillary equipment*. Pada perkembangannya embargo diikuti oleh PBB dan AS pada tahun 1997. Motif embargo secara prinsipil yaitu memperlemah legitimasi kekuasaan Junta di tingkat domestik. Junta menolak tekanan masyarakat internasional untuk membebaskan tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang menjadi tahanan rumah pemerintah militer.

Suu Kyi dianggap sebagai “duri dalam daging” bagi pemerintah berkuasa. Junta sengaja memutus komunikasi antara Suu Kyi dengan para pendukungnya karena kekhawatiran akan bangkitnya gerakan anti pemerintah yang sejatinya sudah mengakar

cukup lama, setidaknya sejak Partai Suu Kyi dianulir Jenderal Saw Maung setelah menang telak dalam pemilu 1990.

Kebijakan rezim Junta terhadap gerakan demokrasi di Myanmar sangat represif. Bahkan kendati akhirnya Suu Kyi dibebaskan menjelang pemilu 2010, partai di bawah pimpinan Suu Kyi di masukkan ke dalam daftar hitam partai yang dilarang ikut pemilu sehingga pada akhirnya pemilu dimenangkan oleh partai dukungan pemerintah, USDP dan NUP dengan kemenangan telak. Kemenangan partai kanan di Myanmar menjadi indikator bahwa embargo yang dijatuhkan kepada Junta tidak efektif. Karena alih-alih memperlemah rezim berkuasa, sanksi justru menyulitkan perekonomian rakyat, sehingga berimplikasi pada terbukanya peluang bagi partai penguasa untuk melakukan *many politics*.

Konstalasi kepentingan global

Hemat penulis sedikitnya terdapat dua faktor di tingkat global yang berpengaruh terhadap gagalannya sanksi ekonomi terhadap penguasa Myanmar, yaitu: (1) simbiosis mutualisme Junta dengan Cina dan India; dan (2) aliansi dengan Korea Utara.

Faktor India dan Cina

Ekonom Goldman Sachs, bank investasi terbesar AS pada tahun 2001 memprediksi India dan Cina disamping Brasil dan Rusia yang kemudian dikenal BRIC akan menjadi empat ekonomi terbesar di dunia pada 2050 atau raksasa-raksasa baru ekonomi dunia (Media Indonesia: RI berpeluang masuk kelompok raksasa baru, 17). Sementara itu menurut catatan *World Economic Outlook* kontribusi Cina terhadap

PDB global tahun 2007 mencapai 10,8%, hanya kalah dari AS (21,4%); dan jauh di atas Jepang yang hanya mencapai 6,6%; India (4,6%); Jerman (4,3%); Inggris (3,3%); Rusia (3,2%); dan Prancis (3,2%). Sementara total PDB Negara Sedang Berkembang (NSB) adalah 41% (Winarno, B., 2010, 143). Lebih jauh, Bank Dunia memprediksi pada tahun 2020 *share* Cina pada perdagangan akan naik 3 kali lipat dari sekarang (2004) mencapai 10% (Wibowo, I., 2004, 64).

Di sisi lain India menunjukkan ambisi yang luar biasa dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Lihat saja misalnya pada tahun 2003 pertumbuhan rata-rata negeri itu mencapai 8,5%; tahun 2004 (7%); 2005 (9,0%); dan 2006 (9,2%) (Panagaria, A., 2008, 5). Pada saat yang bersamaan India hanya memiliki produksi minyak mentah 21,1 juta ton pada tahun 2004 (bandingkan dengan misalnya Indonesia yang memproduksi sejuta lebih barel perhari) (Suhanda, I., 2007, xxi). Padahal komposisi sektoral perekonomian India didominasi sektor Industri hingga 27% (2004-5) dari pada pertanian yang hanya 21% (Panagaria, A., 2008, 13), artinya kebutuhan akan energi sangat tinggi. Hal serupa juga terjadi pada Cina. Dengan angka-angka pertumbuhan yang fantastis tak ayal Cina seperti India juga memiliki ketergantungan kepada sumber energi yang tersedia di Myanmar.

Dengan percepatan pertumbuhan yang mengagetkan baik Cina maupun India membutuhkan sumber energi dalam jumlah banyak untuk menggerakkan perekonomiannya. Sementara Myanmar yang secara geografis berbatasan dengan kedua negara tersebut merupakan produsen energi tertua dunia. Burma memproduksi 18.000 barel

minyak bumi perhari dimana 90% merupakan gas alam (birmanie.total.com: *Oil and gas in Myanmar*) yang sangat dibutuhkan sebagai penggerak roda perekonomian Indi dan Cina.

Kepentingan nasional kedua negara kuat Asia itulah yang kemudian menuntut keduanya untuk menjalin hubungan harmonis dengan Junta, sehingga tidak mengherankan bila Cina dan India berlomba-lomba merebut hati Junta agar mau melakukan aneka kerjasama terutama dalam bidang pertambangan gas dan minyak bumi sehingga tidak mengherankan bila berbagai paket bantuan finansial maupun pembangunan infrastrukturpun mengalir ke negeri Junta.

Hubungan ekonomi Myanmar dengan India dan Cina memperkokoh basis ekonomi Junta yang sulit dipungkiri kemudian berpengaruh pada melemahnya “daya pukul” embargo yang dilakukan AS, UE dan PBB. Justru yang menarik, alih-alih memperlemah basis ekonomi Junta sanksi ekonomi justru membawa multi efek yang luar biasa memilukan bagi warga Burma. Beberapa fakta yang dapat ditunjuk, sebagaimana dipublikasikan oleh Burma Campaign UK pada bulan Maret tahun 2007, adalah lebih dari 60% penduduk Burma hidup dalam kemiskinan serta tingginya kematian bayi, bahkan dengan rasio satu banding sepuluh bayi meninggal sebelum usia 5 tahun (The Burma Campaign UK, 2007, 1). Lebih jauh, kesulitan ekonomi warga negara juga berpotensi membuka kemungkinan terjadinya *many politics* partai kanan dalam pemilu November 2010. Asumsi ini tidak berlebihan, bukti paling mudah ditunjuk adalah kemenangan telak

80% kedua partai dukungan Junta dalam pemilu.

Pengaruh Korea Utara (Korut)

Permusuhan AS-Korut meningkat terutama setelah Korut meningkatkan kemampuan senjata nuklirnya. Pola dilema keamanan (*dilemma security adalah* adalah keadaan dimana ketika suatu negara meningkatkan keamanannya dengan misalnya meningkatkan jumlah kepemilikan pesawat tempur, maka itu dimaknai oleh negara lain sebagai ancaman dan di-responnya dengan meningkatkan keamanan pula terjadi dalam hubungan kedua negara. Logika "musuhnya musuh adalah teman" nampaknya menjadi latar belakang pemikiran para pemimpin Korut untuk menjalin kerjasama dengan Myanmar. Bentuk kerjasama paling dianggap berbahaya dari dua negara itu bagi AS adalah kerjasama militer.

Diyakini, nuklir Myanmar berasal dari Korut, bahkan Robert Kelley (Direktur IAEA) sebagaimana dikutip oleh Jerome E. Wirawan dalam tulisan "Myanmar dan Ambisi Nuklirnya" yang dipublikasikan oleh harian *Media Indonesia* (Selasa 28 Desember 2010), menegaskan bahwa yang dilakukan oleh Junta adalah mengembangkan senjata nuklir karena mereka melakukannya secara rahasia dengan proses kimia yang mencurigakan. Gelagat Junta yang semakin tidak kooperatif menjadi indikasi yang sangat kuat betapa embargo tidak hanya tidak produktif bahkan kontra produktif.

KESIMPULAN

Dalam kasus demokratisasi di Myanmar konteks internasional memiliki peran penting. Embargo terhadap Myanmar terbukti kontra produktif. Alih-alih melemahkan basis ekonomi Junta sehingga diharapkan akan melahirkan gejolak politik dan deligitimasi terhadap kekuasaannya embargo justru berimplikasi pada kesulitan ekonomi rakyat Burma yang berarti membuka kemungkinan untuk *many politics* dari partai-partai berhaluan kanan. Asumsi ini menjadi meyakinkan dengan kemenangan telak partai dukungan Junta yang mencapai 80%, padahal Junta merupakan pemerintah militer represif dengan pelanggaran HAM berat.

Celaknya situasi tersebut bersamaan dengan konspirasi kepentingan ekonomi-politik antara Cina, India dan Korut dengan Junta. Di satu sisi Cina dan India sebagai aktor ekonomi kuat dunia melihat potensi gas yang terkandung di Myanmar sebagai potensi energi masa depan mereka, sementara di sisi yang berbeda Junta di Myanmar melihat ambisi energi Cina dan India sebagai peluang membangun kekuatan ekonomi Junta yang berada dalam kesulitan akibat embargo.

Sementara dalam isu yang berbeda, permusuhan Korut dengan AS, memberi inisiatif bagi negeri itu untuk berkoalisi dengan Myanmar. Bentuk paling kasat mata adalah transfer teknologi nuklir dari Korut ke Myanmar. Konstelasi kepentingan Junta dengan negara-negara tersebut telah meruntuhkan sekenario trio AS, PBB dan UE untuk mendesain masa depan demokrasi di negeri para Jenderal itu.

Keterlibatan Cina, India dan Korut dalam kegagalan embargo menjadi indikasi (1) betapa distribusi kekuatan ekonomi-politik global telah terpolarisasi menjadi lebih kompleks. AS, UE dan PBB bukan lagi menjadi aktor-aktor global yang tanpa tanding, kebangkitan kedua raksasa Asia nampaknya melemahkan bila enggan mengatakan: mengakhiri signifikansi kekuatan ekonomi-politik AS, UE dan PBB; (2) pola perubahan kekuatan ekonomi-politik beralih dari yang sebelumnya berada di barat berpindah ke timur, dan (3) perubahan pola tersebut nampaknya akan membuka kemungkinan perubahan tingkah laku negara-negara dunia ketiga yang nampak dari, salah satunya perilaku Burma.

DAFTAR PUSTAKA

- Mas'ood, Mohtar, 2003. *NEGARA, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwono, Andi, 2008. *Analisa Politik Luar Negeri* (diktat kuliah). Semarang: Ilmu Hubungan Internasional. FISIPOL. UNWAHAS.
- Panagaria, Arvin, 2008. *India The Emerging Giant*. New York: OXFORD.
- Suhanda, Irwan, 2007. *India, Bangkitnya Raksasa Baru Asia: calon pemain utama dunia di era globalisasi*. Jakarta: Kompas.
- Winarno, Budi, 2010. *Melawan Gurita Neo Liberalisme*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wibowo, I, 2004. *Belajar Dari Cina: bagaimana Cina merebut peluang dalam era globalisasi*. Jakarta: Kompas.
- Burma Campaign UK, 2007. "Burma-India Relations: A betrayal of democracy and human right" (A summary of the key issues relating to Burma and India).
- "Indonesia Diminta Tolak Hasil Pemilu Myanmar" dalam <http://tempointeraktif.com>, Senin 15 November 2010-14:41 wib., diakses dari: <http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/11/15/brk,20101115-291979.id.html>, Selasa 21 des 2010, pukul 10:30 WIB.
- "PBB Kutuk Hasil Pemilu Myanmar" dalam <http://international.okezone.com>., Jum'at, 19 November 2010 - 11:08 wib diakses dari: <http://international.okezone.com/read/2010/11/19/18/394786/pbb-kutuk-hasil-pemilu-myanmar>, Selasa 21 des 2010, pukul 10:30 WIB.
- Media Indonesia*. Selasa 28 Desember 2010.